

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# Percepat Rekonsiliasi Temuan dan Rekomendasi BPK

INSPEKTORAT DKI Jakarta diminta mempercepat proses rekonsiliasi hasil temuan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.

Diketahui, pada Kamis (25/7/2024) lalu, BPK mengumumkan berbagai catatan hasil temuan pengelolaan keuangan, meski pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh tahun berturut-turut.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi mengatakan, rekonsiliasi harus segera dilakukan agar para organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dapat segera menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2023.

Dengan begitu, tata kelola keuangan yang dilakukan pemerintah daerah bisa semakin baik.

"Menegenai temuan di tahun 2023 itu belum bisa dilakukan karena masih

dipilah-pilah oleh Inspektorat, nanti akan disampaikan kepada kita hal-hal yang perlu ditindaklanjuti yang disampaikan oleh BPK," kata Rasyidi pada Rabu (31/7/2024).

Sedangkan Anggota Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta Manuara Siahaan, mengatakan data hasil temuan dan rekomendasi LHP BPK diperlukan oleh Komisi C dalam melakukan fungsi pengawasan.

Dengan demikian, Komisi C bisa mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga pelaksanaan pemerintahan akan semakin baik.

"Kami mohon kepada Inspektorat temuan ini bisa diberikan kepada kami," ujar Manuara.

Sementara itu Inspektur Pembantu III Provinsi DKI Jakarta Puji Wahyudi Ode menyatakan, segera memberikan data temuan dan rekomendasi LHP BPK RI kepada seluruh OPD terkait.

Hingga saat ini, data temuan dan rekomendasi LHP BPK Republik Indonesia sedang dalam proses rekonsiliasi guna memastikan temuan dan rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh SKPD sudah sesuai peruntukannya.

(faf)



Dok. DPRD DKI